

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang telah memberi kewenangan kepada daerah kabupaten/ kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut menandakan bahwa adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah dalam melakukan segala sesuatu baik dalam pengembangan maupun hal- hal lain yang kiranya dapat membawa perubahan bagi daerah itu sendiri dan tentunya dalam menjalankan tugasnya daerah dituntut untuk bertanggung jawab. Dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah secara tidak langsung dituntut untuk mencari biaya yang besar guna untuk melangsungkan pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintah. Artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas- luasnya dalam mengolah potensi daerah. Adapun salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat salah satunya adalah dalam sektor pariwisata, seperti pada judul yang diangkat dalam penelitian ini. Yang mana pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan

sektor pariwisata di daerahnya guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam dunia ekonomi jika sektor tersebut berkembang atau mengalami hambatan maka hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kehidupan bernegara, karena dalam perkembangannya industry pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Setiap daerah memiliki potensi masing- masing dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga usaha yang dilakukan pemerintah juga berbeda- beda, baik dalam masalah tata peraturannya maupun proses pengolahannya. Sebagaimana yang terterta dalam Peraturan Daerah Kota Malang N o 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang berada di Kota Malang selain pemerintah, adapun dibutuhkannya juga bantuan dan partisipasi dari pihak- pihak lain seperti lembaga- lembaga tertentu yang bersifat non pemerintah, Sumber Daya Manusia atau SDM, rencana atau stretegi, biaya serta sarana prasarana atau dengna kata lain fasilitas. Dengan adanya partisipasi dari pihak- pihak lain tersebut dan persoalan yang sedang terjadi saat ini maka dibutuhkannya program- program ataupun kebijakan yang kiranya diharapkan dapat menjadi penunjuk yang benar dalam usaha melakukan pengembangan terhadap sektor pariwisata di Kota Malang sendiri. Tujuan pengembangan tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan koordinasi yang baik dan benar, baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang sudah siap terlibat dan bekerja sama dalam prose pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata dapat diprioritaskan sebagai bagian penting dari segi pembangunan ekonomi jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dari pemerintah daerah. Menurut Hessel Nogi S Tangkilisan (2002 : 60) hal ini meliputi pengembangan perwilayahan, pengelompokan obyek serta daya tarik wisata, pengembangan produk wisata, pengembangan jaringan transportasi antar daerah serta internasional, dan pengembangan pusat jaringan publik. Dengan adanya pemahaman konsep pembangunan kepariwisataan diatas, maka usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata tidak terlepas dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, seperti dengan berlakunya retribusi karcis masuk untuk mengunjungi objek wisata tertentu, retribusi parkir, retribusi usaha, serta pajak hotel, pajak hiburan, dan juga pajak restoran. Dan dengan adanya peluasan usaha seperti hotel, restoran, café dan usaha bidang hiburan lainnya dengan sendirinya membuka peluang kesempatan kerja disektor tersebut sehingga pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan daerah itu sendiri, karena majunya industri pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus didukung dengan adanya peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata sehingga industry pariwisata berkembang dengan baik.

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak daya tarik wisata alam khususnya Kota Malang, dimana Kota ini mempunyai peluang yang cukup prospektif untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan pariwisata di daerah lain bahkan mancanegara, hal ini karena objek wisata yang ada cukup beragam dan mempunyai karakteristik atau ciri khusus yang tidak dimiliki

oleh daerah lain. Tetapi hal tersebut berubah sejak 2 tahun terakhir yang bertepatan dengan munculnya pandemic atau virus corona (covid- 19) dimana seluruh proses atau kegiatan masyarakat dibatasi oleh kebijakan- kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang ada dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang bahwa pandemic Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Kota Malang dimana Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan sebesar 20,78 %. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan dari pemerintah setempat seperti melakukan atau mengeluarkan kebijakan tentang penanganan sektor pariwisata untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi, sehingga apa yang diharapkan dapat dicapai. Tetapi keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari peran serta semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang ada. Dan diharapkan daerah untuk lebih kreatif dan inovatif, dengan demikian, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat dan dapat membangun daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?
2. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan untuk pengembangan sektor pariwisata oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bersifat Teoritis

1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah .
2. Memperoleh pengetahuan tentang potensi wisata di Kota Malang peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sektor pariwisata di Kota Malang.

1.4.2. Bersifat Praktis

1. Bagi pemerintah : dengan adanya penelitian ini, kiranya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai masukan dalam hal membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan sektor pariwisata di Kota Malang.
2. Bagi penulis : dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui dan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan karya ilmiah, dimana untuk melatih serta mengembangkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah.

3. Bagi pengembang ilmu pengetahuan : diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat pula menambah kajian mengenai upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.